



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 267 TAHUN 2024
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY*
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBUTUHAN PENDANAAN GAJI KETIGA
BELAS DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, anggaran yang diperlukan antara lain untuk pembayaran gaji ketiga belas bagi penerima gaji ketiga belas di daerah, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kebutuhan pendanaan gaji ketiga belas di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tambahan sumber pendanaan lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, penarikan dana bagi hasil yang ditempatkan dalam fasilitas *treasury deposit facility* setelah masa *holding period* salah satunya dapat dilakukan dalam hal terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBUTUHAN PENDANAAN GAJI KETIGA BELAS DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan kondisi lain yang harus dipenuhi untuk penarikan dana *treasury deposit facility* tahun 2023 oleh pemerintah daerah setelah masa *holding period*, yakni dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan gaji ketiga belas di daerah tahun anggaran 2024.

KEDUA : Penarikan dana *treasury deposit facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sebesar Rp7.368.690.685.702 (tujuh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah) untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) daerah.

KETIGA : Rincian penarikan dana *treasury deposit facility* masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Rincian dana *treasury deposit facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan oleh:

a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk menerbitkan rekomendasi penyaluran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *Treasury Deposit Facility*;

b. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *Treasury Deposit Facility* untuk melakukan pemindahbukuan dana *treasury deposit facility* ke Rekening Kas Umum Daerah, berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mengelola rekening *treasury deposit facility* di Bank Indonesia; dan
- d. pemerintah daerah untuk mencatat penerimaan dana *treasury deposit facility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Remunerasi atas dana *treasury deposit facility* yang dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada periode penyaluran remunerasi berikutnya.

KEENAM : Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana *treasury deposit facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pemerintah daerah dapat menggunakan dana *treasury deposit facility* untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan;
9. Gubernur/Bupati/Wali kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 267 TAHUN 2024
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DALAM
RANGKA MENDUKUNG KEBUTUHAN PENDANAAN GAJI
KETIGA BELAS DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF) DALAM
RANGKA MENDUKUNG KEBUTUHAN PENDANAAN GAJI KETIGA BELAS DI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)					
NO	NAMA DAERAH	SALDO DANA TDF (DESEMBER 2023)	DANA TDF YANG TELAH DITARIK	PENARIKAN DANA TDF	SISA DANA TDF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4) – (5)
1	Kab. Aceh Barat	157.184.183.000	34.326.875.804	34.457.448.573	88.399.858.623
2	Kab. Nagan Raya	49.807.247.000	26.662.492.917	23.144.754.083	-
3	Kab. Tapanuli Selatan	42.432.970.000	32.175.919.814	10.257.050.186	-
4	Provinsi Riau	232.429.802.000	168.907.018.302	63.522.783.698	-
5	Kab. Indragiri Hilir	81.599.827.000	55.592.919.527	26.006.907.473	-
6	Kab. Kampar	184.798.869.000	64.945.055.384	64.999.626.692	54.854.186.924
7	Kab. Kuantan Singingi	43.181.588.000	32.795.922.658	10.385.665.342	-
8	Kab. Rokan Hilir	225.817.378.000	134.330.364.065	43.136.672.824	48.350.341.111
9	Kab. Rokan Hulu	56.088.085.000	40.916.234.816	15.171.850.184	-
10	Kab. Siak	136.353.880.000	102.416.146.921	33.937.733.079	-
11	Kota Dumai	45.459.012.000	45.256.344.307	202.667.693	-
12	Kota Pekanbaru	57.012.943.000	48.204.215.321	8.808.727.679	-
13	Kab. Kepulauan Meranti	30.862.408.000	27.681.509.489	3.180.898.511	-
14	Provinsi Jambi	179.369.416.000	137.164.477.525	42.204.938.475	-
15	Kab. Batang Hari	40.452.072.000	29.486.119.080	10.965.952.920	-
16	Kab. Kerinci	28.613.234.000	28.524.729.679	88.504.321	-
17	Kab. Muaro Jambi	45.662.177.000	32.898.097.368	12.764.079.632	-
18	Kab. Sarolangun	54.645.129.000	30.617.999.602	24.027.129.398	-
19	Kab. Tanjung Jabung Barat	393.380.674.000	212.316.202.755	31.337.077.666	149.727.393.579
20	Kab. Tanjung Jabung Timur	54.812.635.000	24.438.313.526	24.487.539.835	5.886.781.639
21	Kab. Tebo	60.077.938.000	23.404.561.186	23.519.945.802	13.153.431.012
22	Kota Sungai Penuh	26.893.649.000	22.081.106.503	4.812.542.497	-
23	Provinsi Sumatera Selatan	745.606.605.000	134.432.861.210	135.231.495.826	475.942.247.964
24	Kab. Lahat	898.950.823.000	49.083.650.283	49.298.379.514	800.568.793.203
25	Kab. Musi Banyuasin	274.790.429.000	69.944.298.370	69.944.298.370	134.901.832.260
26	Kab. Musi Rawas	140.875.917.000	37.448.833.441	37.701.650.749	65.725.432.810
27	Kab. Muara Enim	523.239.012.000	61.824.431.289	62.184.969.751	399.229.610.960
28	Kab. Ogan Komering Ilir	83.317.919.000	58.697.830.200	24.620.088.800	-

(dalam rupiah)					
NO	NAMA DAERAH	SALDO DANA TDF (DESEMBER 2023)	DANA TDF YANG TELAH DITARIK	PENARIKAN DANA TDF	SISA DANA TDF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4) – (5)
29	Kota Prabumulih	99.054.958.000	66.503.693.898	32.551.264.102	-
30	Kota Pagar Alam	87.029.911.000	20.529.737.388	20.582.387.696	45.917.785.916
31	Kab. Banyuasin	94.272.903.000	70.383.699.528	23.889.203.472	-
32	Kab. Ogan Ilir	77.767.195.000	32.095.647.538	32.358.500.308	13.313.047.154
33	Kab. OKU Timur	71.695.471.000	40.492.625.698	31.202.845.302	-
34	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	167.152.651.000	22.987.317.405	23.137.317.406	121.028.016.189
35	Kab. Musi Rawas Utara	214.507.049.000	17.134.198.777	17.196.401.470	180.176.448.753
36	Kab. Bengkulu Utara	59.938.988.000	31.040.974.115	28.898.013.885	-
37	Provinsi DKI Jakarta	5.635.471.860.000	1.189.691.682.627	1.191.840.798.012	3.253.939.379.361
38	Provinsi Jawa Barat	671.602.532.000	464.967.099.245	206.635.432.755	-
39	Kab. Bandung	185.499.896.000	142.697.845.215	42.802.050.785	-
40	Kab. Bekasi	152.337.974.000	148.830.977.261	3.506.996.739	-
41	Kab. Karawang	109.583.421.000	106.596.398.829	2.987.022.171	-
42	Kab. Sukabumi	98.357.825.000	86.842.478.711	11.515.346.289	-
43	Provinsi Jawa Timur	686.528.831.000	511.413.815.886	175.115.015.114	-
44	Kab. Bojonegoro	1.434.245.889.000	95.849.646.335	96.417.857.182	1.241.978.385.483
45	Provinsi Kalimantan Barat	125.611.193.000	93.928.106.296	31.683.086.704	-
46	Kab. Ketapang	114.797.233.000	54.969.140.146	55.351.496.301	4.476.596.553
47	Kab. Sanggau	115.867.299.000	36.337.730.674	36.479.572.367	43.049.995.959
48	Kab. Sekadau	23.553.068.000	20.851.006.318	2.702.061.682	-
49	Provinsi Kalimantan Tengah	1.311.837.155.000	700.244.672.058	88.854.631.424	522.737.851.518
50	Kab. Barito Selatan	374.213.607.000	27.492.091.007	27.643.417.931	319.078.098.062
51	Kab. Barito Utara	1.236.844.680.000	35.605.276.125	38.420.291.086	1.162.819.112.789
52	Kab. Kapuas	765.390.836.000	59.964.653.149	60.023.753.457	645.402.429.394
53	Kab. Kotawaringin Barat	181.482.566.000	33.415.175.432	33.501.786.048	114.565.604.520
54	Kab. Kotawaringin Timur	248.953.806.000	60.856.288.525	61.013.051.449	127.084.466.026
55	Kota Palangkaraya	180.978.402.000	35.152.148.493	35.218.883.647	110.607.369.860
56	Kab. Katingan	154.559.111.000	27.226.688.335	27.380.440.566	99.951.982.099
57	Kab. Seruyan	182.898.235.000	24.319.825.862	24.416.664.517	134.161.744.621
58	Kab. Sukamara	171.774.214.000	17.136.124.204	17.212.662.666	137.425.427.130
59	Kab. Lamandau	162.443.272.000	21.614.386.573	21.673.212.881	119.155.672.546
60	Kab. Gunung Mas	236.938.772.000	27.921.778.070	31.315.777.686	177.701.216.244
61	Kab. Pulang Pisau	188.045.589.000	19.691.823.609	19.730.319.302	148.623.446.089
62	Kab. Murung Raya	906.878.830.000	30.788.355.036	37.030.553.629	839.059.921.335
63	Kab. Barito Timur	171.219.675.000	25.372.840.048	25.417.167.357	120.429.667.595
64	Provinsi Kalimantan Selatan	1.494.475.990.000	134.811.641.893	135.068.436.971	1.224.595.911.136
65	Kab. Banjar	318.839.919.000	59.794.966.800	60.031.293.723	199.013.658.477

(dalam rupiah)					
NO	NAMA DAERAH	SALDO DANA TDF (DESEMBER 2023)	DANA TDF YANG TELAH DITARIK	PENARIKAN DANA TDF	SISA DANA TDF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4) – (5)
66	Kab. Barito Kuala	238.910.635.000	34.667.302.958	34.856.285.343	169.387.046.699
67	Kab. Hulu Sungai Selatan	135.163.572.000	41.044.627.640	41.179.055.333	52.939.889.027
68	Kab. Hulu Sungai Tengah	218.909.242.000	25.479.529.642	28.884.246.071	164.545.466.287
69	Kab. Hulu Sungai Utara	231.704.614.000	35.040.945.579	35.097.714.195	161.565.954.226
70	Kab. Kotabaru	758.147.091.000	48.943.851.838	49.009.988.993	660.193.250.169
71	Kab. Tabalong	368.764.124.000	47.521.121.258	47.637.163.643	273.605.839.099
72	Kab. Tanah Laut	226.152.411.000	46.437.846.541	46.556.836.772	133.157.727.687
73	Kab. Tapin	470.246.732.000	393.295.002.736	28.586.491.236	48.365.238.028
74	Kota Banjarbaru	192.812.046.000	30.344.617.120	30.442.117.120	132.025.311.760
75	Kab. Balangan	1.098.657.770.000	36.261.054.632	36.427.054.633	1.025.969.660.735
76	Kab. Tanah Bumbu	1.416.066.017.000	43.883.319.114	43.985.212.884	1.328.197.485.002
77	Provinsi Kalimantan Timur	3.784.618.371.000	1.976.338.738.006	168.317.763.398	1.639.961.869.596
78	Kab. Berau	1.454.993.893.000	55.331.975.757	55.566.815.680	1.344.095.101.563
79	Kab. Kutai Kartanegara	3.924.545.964.000	2.232.276.747.084	179.277.031.695	1.512.992.185.221
80	Kab. Kutai Barat	1.438.121.168.000	74.967.675.798	75.215.591.260	1.287.937.900.942
81	Kab. Kutai Timur	2.974.580.853.000	113.767.943.285	113.973.260.824	2.746.839.648.891
82	Kab. Paser	884.064.944.000	61.833.519.870	61.904.239.486	760.327.184.644
83	Kota Balikpapan	740.708.725.000	60.107.113.794	60.818.690.718	619.782.920.488
84	Kota Bontang	785.900.090.000	48.167.321.874	48.202.968.105	689.529.800.021
85	Kota Samarinda	713.036.591.000	66.009.903.262	66.199.019.724	580.827.668.014
86	Kab. Penajam Paser Utara	685.453.131.000	43.579.053.599	43.664.625.753	598.209.451.648
87	Kab. Mahakam Ulu	914.399.986.000	17.862.931.723	17.862.931.723	878.674.122.554
88	Provinsi Sulawesi Tengah	530.526.265.000	326.259.190.852	122.666.079.860	81.600.994.288
89	Kab. Banggai	687.606.436.000	62.680.997.223	62.826.333.223	562.099.105.554
90	Kab. Banggai Kepulauan	73.257.263.000	47.113.589.628	21.131.970.718	5.011.702.654
91	Kab. Buol	68.628.896.000	28.248.209.589	28.407.645.667	11.973.040.744
92	Kab. Toli-Toli	66.575.557.000	31.945.429.562	32.083.160.332	2.546.967.106
93	Kab. Donggala	73.568.797.000	30.881.687.001	31.119.129.309	11.567.980.690
94	Kab. Morowali	480.132.281.000	38.487.907.069	38.667.272.454	402.977.101.477
95	Kab. Poso	77.257.266.000	37.657.022.677	37.807.778.831	1.792.464.492
96	Kota Palu	81.654.183.000	39.623.347.923	39.758.826.692	2.272.008.385
97	Kab. Parigi Moutong	66.419.388.000	40.243.516.247	26.175.871.753	-
98	Kab. Tojo Una-Una	71.752.025.000	29.129.000.565	29.301.423.642	13.321.600.793
99	Kab. Sigi	66.547.534.000	33.814.846.423	32.732.687.577	-
100	Kab. Banggai Laut	72.661.657.000	43.931.539.064	15.537.657.964	13.192.459.972
101	Kab. Morowali Utara	196.206.290.000	32.881.137.121	32.994.992.814	130.330.160.065
102	Kab. Luwu Timur	82.562.997.000	35.186.122.420	37.099.018.190	10.277.856.390

(dalam rupiah)					
NO	NAMA DAERAH	SALDO DANA TDF (DESEMBER 2023)	DANA TDF YANG TELAH DITARIK	PENARIKAN DANA TDF	SISA DANA TDF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4) – (5)
103	Provinsi Sulawesi Tenggara	513.003.296.000	107.028.228.780	107.620.671.088	298.354.396.132
104	Kab. Buton	42.940.277.000	20.010.727.940	20.010.727.940	2.918.821.120
105	Kab. Konawe	108.135.304.000	39.877.233.833	40.081.953.603	28.176.116.564
106	Kab. Kolaka	147.816.687.000	30.210.133.479	30.301.803.480	87.304.750.041
107	Kota Bau-bau	42.911.163.000	27.167.498.602	15.743.664.398	-
108	Kab. Konawe Selatan	166.125.511.000	35.343.764.947	35.481.461.178	95.300.284.875
109	Kab. Bombana	131.276.444.000	81.730.117.494	21.593.495.776	27.952.830.730
110	Kab. Wakatobi	41.771.559.000	19.190.393.323	19.292.064.093	3.289.101.584
111	Kab. Kolaka Utara	142.690.700.000	83.157.915.351	23.693.645.318	35.839.139.331
112	Kab. Konawe Utara	668.415.585.000	32.140.169.007	32.140.169.007	604.135.246.986
113	Kab. Buton Utara	41.477.994.000	16.857.895.566	16.936.639.951	7.683.458.483
114	Kab. Konawe Kepulauan	43.965.569.000	7.498.746.894	7.554.208.432	28.912.613.674
115	Kab. Kolaka Timur	61.702.285.000	38.466.021.038	15.361.180.154	7.875.083.808
116	Kab. Muna Barat	42.122.573.000	15.670.884.870	15.711.169.409	10.740.518.721
117	Kab. Buton Tengah	64.163.316.000	15.058.525.324	15.164.565.171	33.940.225.505
118	Kab. Buton Selatan	41.282.060.000	14.663.121.152	14.731.856.075	11.887.082.773
119	Provinsi Nusa Tenggara Barat	194.778.544.000	118.033.622.020	76.744.921.980	-
120	Kab. Sumbawa	84.401.405.000	52.734.471.851	31.666.933.149	-
121	Kota Bima	29.342.498.000	25.368.986.184	3.973.511.816	-
122	Kab. Sumbawa Barat	400.521.762.000	30.843.817.592	30.934.684.900	338.743.259.508
123	Provinsi Maluku Utara	428.827.822.000	241.797.652.965	71.683.483.676	115.346.685.359
124	Kab. Halmahera Tengah	553.040.541.000	353.652.518.949	30.145.246.887	169.242.775.164
125	Kab. Halmahera Barat	68.542.903.000	59.245.051.013	9.297.851.987	-
126	Kab. Halmahera Timur	499.150.806.000	262.278.882.521	25.518.279.196	211.353.644.283
127	Kab. Halmahera Selatan	180.705.816.000	104.561.401.378	28.607.462.912	47.536.951.710
128	Kab. Kepulauan Sula	38.360.713.000	15.774.192.724	17.343.440.078	5.243.080.198
129	Kota Tidore Kepulauan	104.161.552.000	64.401.245.529	24.751.247.222	15.009.059.249
130	Kab. Pulau Morotai	67.739.607.000	42.158.402.397	16.645.851.644	8.935.352.959
131	Kab. Pulau Taliabu	64.441.489.000	35.991.808.147	7.542.127.295	20.907.553.558
132	Provinsi Banten	296.257.105.000	148.736.794.819	147.520.310.181	-
133	Kota Tangerang Selatan	85.939.745.000	78.828.556.910	7.111.188.090	-
134	Provinsi Bangka Belitung	75.929.654.000	55.626.275.599	20.303.378.401	-
135	Kab. Bangka	42.526.718.000	29.452.244.256	13.074.473.744	-
136	Kab. Bangka Selatan	41.411.262.000	22.093.874.935	19.317.387.065	-
137	Kab. Bangka Barat	33.010.315.000	24.116.388.551	8.893.926.449	-
138	Kab. Belitung Timur	30.081.842.000	24.192.395.818	5.889.446.182	-
139	Kota Batam	119.557.676.000	86.750.914.449	32.806.761.551	-

(dalam rupiah)					
NO	NAMA DAERAH	SALDO DANA TDF (DESEMBER 2023)	DANA TDF YANG TELAH DITARIK	PENARIKAN DANA TDF	SISA DANA TDF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4) – (5)
140	Kab. Lingga	64.227.339.000	23.220.487.975	23.386.199.514	17.620.651.511
141	Kab. Bintan	67.738.603.000	32.791.125.610	32.857.473.841	2.090.003.549
142	Provinsi Kalimantan Utara	380.344.482.000	53.541.641.998	53.638.449.691	273.164.390.311
143	Kab. Bulungan	332.597.443.000	38.853.897.605	38.916.558.144	254.826.987.251
144	Kab. Malinau	551.073.603.000	50.714.672.691	50.818.242.076	449.540.688.233
145	Kab. Nunukan	381.987.057.000	33.216.646.662	33.307.111.200	315.463.299.138
146	Kota Tarakan	167.292.974.000	28.746.708.323	28.774.511.478	109.771.754.199
147	Kab. Tana Tidung	414.721.110.000	21.889.934.704	21.912.754.858	370.918.420.438
148	Provinsi Papua Barat	227.451.503.000	52.762.645.027	52.762.875.797	121.925.982.176
149	Kab. Fak Fak	35.155.534.000	27.605.005.111	7.550.528.889	-
150	Kab. Teluk Bintuni	555.129.764.000	290.053.456.385	29.459.628.251	235.616.679.364
151	Kab. Kaimana	38.923.100.000	22.338.980.536	16.584.119.464	-
152	Kab. Pegunungan Arfak	22.005.055.000	6.678.670.467	6.704.632.006	8.621.752.527
153	Kab. Manokwari Selatan	26.442.176.000	9.863.235.576	9.863.235.577	6.715.704.847
154	Provinsi Papua Selatan	90.150.969.000	14.813.732.361	14.813.732.362	60.523.504.277
155	Kab. Asmat	32.823.546.000	26.307.417.388	6.516.128.612	-
156	Provinsi Papua Tengah	54.990.366.000	21.667.791.594	21.667.791.595	11.654.782.811
157	Kab. Mimika	595.265.168.000	86.997.488.697	87.085.142.543	421.182.536.760
158	Kab. Paniai	33.134.935.000	25.061.269.092	8.073.665.908	-
159	Kab. Puncak	33.271.528.000	26.471.458.916	6.800.069.084	-
160	Kab. Dogiyai	32.983.906.000	13.792.046.716	13.811.489.024	5.380.370.260
161	Kab. Intan Jaya	32.856.381.000	18.322.229.206	14.534.151.794	-
162	Kab. Deiyai	33.341.183.000	18.470.830.682	14.870.352.318	-
163	Provinsi Papua Pegunungan	50.703.692.000	4.868.886.659	12.817.074.793	33.017.730.548
164	Kab. Nduga	33.449.120.000	11.755.796.791	9.940.776.770	11.752.546.439
165	Provinsi Papua Barat Daya	14.047.519.000	13.966.179.081	81.339.919	-
166	Kab. Sorong	33.135.898.000	27.905.690.430	5.230.207.570	-
167	Kab. Raja Ampat	77.118.704.000	49.948.625.996	22.861.894.146	4.308.183.858
168	Kab. Tambrauw	22.287.320.000	10.919.417.004	10.949.513.158	418.389.838
169	Kab. Maybrat	22.916.638.000	9.822.816.824	9.860.432.209	3.233.388.967
170	Kota Sorong	30.300.028.000	26.248.429.964	4.051.598.036	-
171	Provinsi Papua	67.496.568.000	36.165.475.855	31.331.092.145	-
172	Kab. Waropen	11.322.374.000	8.836.997.818	2.485.376.182	-
JUMLAH		60.062.897.116.000	16.358.703.340.876	7.368.690.685.702	36.335.503.089.422

Keterangan:

Perhitungan besaran penarikan dana TDF tahun 2023 dalam rangka dukungan kebutuhan pendanaan gaji ketiga belas di daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam kolom (5) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkiraan kebutuhan gaji ketiga belas di daerah tahun anggaran 2024.
 - a. Perhitungan Kebutuhan Gaji Ketiga Belas Daerah = Gaji dan Tunjangan Melekat + 100% (seratus persen) Tambahan Penghasilan.
 - b. Besaran kebutuhan gaji ketiga belas paling banyak sebesar gaji dan tunjangan melekat dan 100% (seratus persen) tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Komponen gaji dan tunjangan melekat terdiri atas:
 - 1) Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - 2) Tunjangan Keluarga PNS dan PPPK;
 - 3) Tunjangan Jabatan PNS dan PPPK;
 - 4) Tunjangan Fungsional PNS dan PPPK;
 - 5) Tunjangan Fungsional Umum PNS dan PPPK; dan/atau
 - 6) Tunjangan Beras PNS dan PPPK.
 - d. Komponen tambahan penghasilan terdiri atas:
 - 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan PPPK;
 - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS dan PPPK;
 - 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS dan PPPK;
 - 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS dan PPPK; dan/atau
 - 5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS dan PPPK.
 - e. Besaran kebutuhan gaji dan tunjangan melekat untuk 1 (satu) bulan diperhitungkan dengan cara membagi total belanja gaji dan tunjangan melekat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi dengan 14 (empat belas) bulan.
 - f. Besaran kebutuhan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan diperhitungkan dengan cara membagi total tambahan penghasilan dalam APBD dibagi 13 (tiga belas) bulan.
 - g. Besaran kebutuhan gaji ketiga belas dihitung dari besaran kebutuhan gaji dan tunjangan melekat sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditambah tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - h. Data yang digunakan dalam penghitungan adalah data belanja pegawai APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer per tanggal 30 April 2024.
 - i. Terhadap daerah yang belum menyampaikan data APBD tahun anggaran 2024 kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer per tanggal 30 April 2024, digunakan data belanja pegawai di APBD tahun anggaran 2023.
2. Saldo dana TDF yang digunakan dalam perhitungan merupakan sisa dana TDF yang dibentuk pada bulan Desember 2023 setelah dikurangi dengan penarikan dana TDF sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.

3. Besaran penarikan dana TDF masing-masing daerah ditetapkan dengan cara membandingkan besaran kebutuhan gaji ketiga belas dengan besaran saldo dana TDF. Apabila besaran kebutuhan gaji ketiga belas lebih kecil dari besaran saldo dana TDF, dana TDF yang disalurkan adalah sebesar kebutuhan gaji ketiga belas. Dalam hal besaran kebutuhan gaji ketiga belas lebih besar dari besaran saldo dana TDF, dana TDF yang disalurkan adalah sebesar saldo dana TDF.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI